

DEMI PENDAPATAN ASLI DAERAH MENAPAK TILAS INTERAKSI SOSIAL-EKONOMI ORANG ASLI JAYAPURA

Ichsan Ansari Ibrahim*, Sri Hartati* dan Alexander Leonard Griapon*

*Dosen Program Studi Kewirausahaan, ITBKPP

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 10 Desember 2022

Disetujui 31 Januari 2023

Keywords:

Interaksi Sosial - Ekonomi
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Jayapura

ABSTRAK

Abstract : Various efforts have been made through various programs and activities to encourage community empowerment towards self-sufficiency based on the mindset and behavior of the community which continues to develop. The additional task carried out by the sectoral Regional Work Units and district heads is to explore Local Original Revenue and stimulate enthusiasm to create awareness of collecting and giving for the growth of Regional Original Revenue in certain sectors and in certain district spaces for areas of work that are very important and strategic. This study uses a qualitative approach to the type of literature study research. The results of the research conclusions based on the economic theory of growth, equity, and other theories, have positioned members of local clans in a certain type who are always left behind in the economic system built by theories created by experts who are indeed in the streams of classical and modern economics with its various branches, which are usually developed in higher education. Adherents of these schools, graduates from various tertiary institutions, then build their knowledge discourse into practice from within whichever organization they work, followed by people who have been influenced in work organizations, then influence work decision making for societal change, including changes seventeen native ethnic groups in Jayapura Regency.

Abstrak : Berbagai upaya dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian di atas pola pikir dan perilaku masyarakat yang terus berkembang. Tugas tambahan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sektoral dan kepala distrik adalah menggali Pendapatan Asli Daerah dan menggairahkan semangat untuk menciptakan kesadaran memungut dan memberikan bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor-sektor tertentu dan di ruang-ruang distrik tertentu untuk bidang-bidang garapan yang sangat penting dan strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Hasil kesimpulan penelitian yang berdasarkan pada teori ekonomi pertumbuhan, pemerataan, dan teori-teori lainnya, telah memposisikan anggota klen-klen lokal pada suatu tipe tertentu yang selalu tertinggal dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh teori-teori ciptaan para ahli yang memang berada dalam aliran-aliran ekonomi klasik dan modern dengan berbagai cabangnya, yang biasa dikembangkan dalam pendidikan di perguruan tinggi. Para penganut aliran-aliran ini, jebolan dari berbagai perguruan tinggi, kemudian membangun wacana ilmunya ke dalam praktek dari dalam organisasi manapun mereka bekerja, diikuti oleh orang-orang yang telah dipengaruhi dalam organisasi kerja, selanjutnya mempengaruhi pengambilan keputusan kerja bagi perubahan masyarakat, termasuk perubahan masyarakat tujuh belas sub suku bangsa asli di Kabupaten Jayapura.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Ichsan Ansari Ibrahim
Program Studi Kewirausahaan,
Institut Teknologi dan Bisnis Karya Pembangunan Papua,
Jl. YPKP No.51, Sentani Kota
E-Mail : ichsanansariibrahim67@gmail.com

PENDAHULUAN

Mungkinkah pada suatu ketika jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura mengimbangi jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat ? Barangkali para praktisi pemerintahan akan berfikir tidak mungkin hal itu terjadi, karena ada aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat di kabupaten ini dan wilayah-wilayah tetangganya, walaupun terletak dekat dengan ibu kota Provinsi Papua. Kondisi kehidupan masyarakat yang belum "berdaya" tidak akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kecuali terdapat banyak investasi pengelolaan sumber daya alam di daerah ini yang turut mengembangkan sektor jasa-jasa dan perdagangan.

Persoalan yang lain adalah bahwa wilayah ini terletak jauh dari pusat industri dan perdagangan serta jasa, suatu daerah pinggiran geografis ekonomi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sistem ekonomi sederhana masih berlangsung di tengah-tengah perekonomian modern menampakkan posisi orang-orang asli Jayapura berada dalam kehidupan ekonomi campuran yang berorientasi pada "barter" dan "uang". Kebutuhan-kebutuhan yang terintegrasi kepada barang-barang dari luar dan jasa-jasa yang hanya dapat diperoleh dengan "uang" menjadi semakin meningkat, namun cara memperoleh pendapatan dalam rumah tangga masih mengandalkan pekerjaan yang bertumpu pada sektor pertanian tradisional, bahan galian permukaan tanah, bangunan, perdagangan subsistence, jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya di samping sektor informal secara terbatas dan insidental.

Dengan cara memperoleh pendapatan keluarga yang insidental, tidak akan dapat memenuhi kebutuhan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, peran pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk organisasi distrik memacu terciptanya kegiatan-kegiatan sektor-sektor di ruang-ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang berkesinambungan. Dengan demikian dapat diharapkan adanya pekerjaan-pekerjaan tetap yang menjamin keberlangsungan hidup setiap penduduk Kabupaten Jayapura dalam kepastian pendapatan rumah tangga. Penguatan daya beli dan sebagian dari pendapatan dapat digunakan untuk tabungan rumah tangga dan membayar pajak-pajak atau retribusi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Bertolak dari pengalaman perkembangan organisasi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam kurun waktu empat puluh tahun, maka sepuluh tahun belakangan ini (terutama antara tahun 2007 dan 2009), Pemerintah Kabupaten Jayapura memulai upaya pemberdayaan masyarakat menuju "kemandirian".

Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae bersama wakilnya Zadrak Wamebu yang menjalankan kepemimpinan organisasi kabupaten ini, pada tahun 2007 hingga 2009 menawarkan konsep pemberdayaan dengan ciri-ciri kemandirian yaitu dengan menempatkan masyarakat selaku subyek aktif dalam pembangunan, masyarakat harus mempunyai pendapatan yang tetap sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, masyarakat harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, masyarakat harus mampu bermitra (usaha) dengan pihak lain, dan masyarakat harus memiliki kematangan spiritual. Lima ciri kemandirian yang dikehendaki tersebut apabila dapat diwujudkan akan membuat masyarakat Kabupaten Jayapura menjadi masyarakat yang kuat dan dapat menyokong Pemerintahan Kabupaten dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pelayanan publik.

Berbagai upaya dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian di atas pola pikir dan perilaku masyarakat yang terus berkembang. Tugas tambahan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sektoral dan kepala distrik adalah menggali Pendapatan Asli Daerah dan menggairahkan semangat untuk menciptakan kesadaran memungut dan memberikan bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor-sektor tertentu dan di ruang-ruang distrik tertentu untuk bidang-bidang garapan yang sangat penting dan strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Suatu Fatamorgana

Banyak teori pengembangan sosial-ekonomi yang berbasis pada masyarakat manusia sudah dicoba penerapannya di Kabupaten Jayapura (sejak kabupaten ini masih sebagai bagian dari Kesultanan Tidore, Karesidenan Hollandia Belanda, sampai sekarang), baik atas anjuran para ahli, konsultan, peneliti, maupun yang secara formalitas diatur dalam berbagai dokumen kebijakan pemerintah. Kendatipun demikian, nampaknya para birokrat pemerintah sibuk mengejar pelaksanaan program yang mendukung rencana instansi atau atas nama instansi dan atau satuan kerjanya. Sedangkan warga masyarakat sibuk dengan kegiatannya sendiri, diantaranya ada yang terintegrasi penuh dengan kegiatan instansi pemerintah, terkait sedikit sampai yang tidak terintegrasi sama sekali.

Pendekatan kajian "Etno" dan "kebijakan publik" dalam pengembangan kelembagaan dapat dijadikan acuan sementara, sewaktu memasuki pintu interaksi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Jayapura. Suatu interaksi kultural yang sudah berlangsung sejak belum adanya catatan-catatan tertulis dalam huruf latin, sampai pada suatu titik waktu yang membentang di depan dan tak pernah ditemukan ujungnya, suatu fatamorgana.

Sistem sosial-ekonomi klen-klen lokal diupayakan perubahannya secara "tentative" dan spekulatif dengan kebijakan pemerintah, dicampur-baur dan dibentur pada sistem luar klen suku bangsa yang sering dianggap lebih maju.

Keberpihakan paham terhadap sistem sosial - ekonomi luar, terutama dengan mengikuti berbagai teori yang dibangun dalam kerangka pikir sistem sosial - ekonomi "kapitalis" dan "sosialis", tanpa mengamati secara mendalam kondisi kultur setempat dan alasan-alasan yang dapat mendukung teori-teori itu, telah menyesatkan para perumus dan pelaksana kebijakan publik. Terlebih lagi, respons yang diharapkan pemerintah dari masyarakat lokal pendukung pelaksanaan kebijakan, masih dipertanyakan secara umum. Masyarakat lokal menjadi bingung dan berpura-pura melaksanakan berbagai program, meskipun hanya sebatas proyek dan uang yang ditawarkan. Mereka tidak melestarikan hasil kerja dalam kelembagaan klen-klen dan terus memegang teguh sistem sosial - ekonomi asli, dengan sedikit saja perubahan. Harapan yang digantungkan kepada pemerintah adalah bantuan sejumlah uang, yang terus saja disampaikan melalui surat-surat usulan yang penuh dengan kalimat kehendak dan doa, dalam wujud proposal permohonan bantuan sosial - ekonomi.

B. Siapa Itu Komunitas Asli?

Ketika konsentrasi pandangan kita masuk dalam ruang lingkup "etnografi", maka ketika itu pula wacana kita berubah menjadi "etnocentris". Artinya, etno menjadi pusat minat. Dari dalam area etno itu kita mencoba melihat Kabupaten Jayapura sebagai suatu wilayah daratan antara pegunungan Cycloop (di bagian utara) sampai dengan Mamberamo Hulu Atas (di bagian selatan), antara sungai Wirwai (di bagian barat) sampai sungai Waisamba dan sungai Jaifuri (di bagian timur). Itulah wilayah tinggal dan ruang hidup tujuh belas sub suku bangsa asli yang memiliki karakteristik sesuai dengan lingkungan kehidupan masing-masing.

C. Kultur Penghidupan

Dalam tradisi tujuh belas sub suku bangsa asli terdapat kesamaan pada dorongan kebutuhan hidup dan reaksi mereka terhadap dorongan tersebut dengan memanfaatkan lingkungan sumber daya alam yang tersedia. Pada dasarnya, mereka hidup dengan mengandalkan hubungan ketergantungan langsung pada alam (tanah, hutan dan air) tempat memperoleh makanan utama (sagu) dan makanan suplemen / pengganti (umbi-umbian), serta makanan pendamping (sayur-sayuran, daging, ikan dll), air untuk digunakan setiap hari, bahan-bahan bangunan rumah, dan obat-obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.

Kebutuhan pokok mereka adalah bahan makanan, air, rumah yang nyaman untuk berteduh, obat untuk menyembuhkan penyakit, pengetahuan menggunakan berbagai pendekatan untuk memecahkan persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, dan rasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan memenuhi kebutuhan pokok itu. Kebutuhan pokok lainnya adalah berbakti kepada kekuatan supranatural yang dianggap sebagai pelindung kesehatan dan sumber pemberi nafkah setiap hari. Bahan makanan dan minuman selalu berlimpahan, setiap saat dapat diperoleh langsung dari alam lingkungan (mikro kosmos) tanpa melalui proses dan prosedur yang panjang dan berliku-liku, siap digunakan dengan persyaratan, kewajiban terhadap mikro kosmos dan kekuatan supranatural di belakangnya harus dipenuhi. Kebutuhan pokok harian yang dimaksud di atas biasanya disebut "kebutuhan dasar nyata".

D. Model Penguasaan Ruang Wilayah

Segala sesuatu yang diusahakan melalui cocok tanam, berburu, menangkap ikan, memetik hasil alam, dapat dijual ke luar klen, melalui persetujuan kepala klen. Penjualan hasil berkaitan dengan hubungan dagang, tukar menukar dan kebutuhan uang tunai yang saling mengambil manfaat antar klen/sub suku bangsa, dan bila klen penjual hasil telah dapat memenuhi kebutuhan sendiri yang cukup berlimpah dalam model pemenuhan kebutuhan subsistence.

Suatu kenyataan, ruang wilayah nyata yang dijual berdampak pada kerusakan sistem kehidupan yang dibangun dengan ruang wilayah idea, atau sebaliknya, ruang wilayah pada sejumlah anggota klen sudah rusak duluan sebelum ruang wilayah nyata dijual. Hanya para anggota klen, sub suku bangsa penjual ruang wilayah dan benda-benda di atasnya dan para peneliti ahli psikologi sosial yang mengetahui latar belakang tindakan penjualan lepas seperti itu.

E. Kepemimpinan Dan Kelembagaan Komunitas Lokal.

Gabungan klen (yang berlainan asal usul) dalam suatu ruang wilayah juga menjadi satu sub suku bangsa. Kepala klen disebut dengan berbagai istilah bahasa sub suku bangsa (di Sentani orang menyebutnya Koselo/ Kotelo untuk klen kecil atau Ondofolo untuk klen besar, Tepera dan Yokari memberi sebutan Ondewafi dan Yarise, Gresi dan Kemtuk menyebut Trang Dukeno, Moi menyebut Done, Nimboran memberi gelar Iram untuk klen besar dan Dunensking Wouke pada klen kecil) yang mengandung konsep kepemimpinan lokal tradisional. Kepala klen dibantu oleh pengurus klen sesuai kebutuhan klen, yaitu pemimpin urusan-urusan yang terkait sosial budaya, ekonomi, tumbuh-tumbuhan, binatang darat, hewan air, kesehatan/kesakitan, pendidikan, perbekalan, administrasi, hukum dan peradilan, atau penegakan norma/aturan-aturan tradisi, perkawinan, diplomasi, perang dan lain-lain urusan sesuai kebutuhan.

Tipe kepemimpinan kepala klen tumbuh dalam situasi struktur keluarga yang menghadapi lingkungan persaha- batan, damai, dan penuh hubungan diplomatis antara klen dan sub suku bangsa tetangga. Struktur kepemimpinan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: posisi anak laki-laki tertua (dari istri tertua, atau anak laki-laki dari istri pertama) sebagai kepala klen. Sub suku bangsa Kemtuk dan Gresi menyebutnya "Dukeno", di kalangan suku bangsa Nimboran terkenal sebagai "Dunesking wou"

F. Lingkungan Kebijakan Sosial-Ekonomi Dan Pengaruhnya Pada Suku Bangsa Asli

Sistem perekonomian kapitalis turut menarik anggota klen- klen sub suku bangsa asli ke dalam mata pencaharian baru lainnya, yang menonjol adalah pekerja pada kantor-kantor pemerintah, polisi, tentara, guru sekolah, perawat kesehatan, sopir kendaraan darat, pekerja di kapal laut, pekerja pada bangunan infrastruktur kota dan jaringan jalan, yang dilaksanakan setelah perang dunia ke dua hingga sekarang. Sekolah-sekolah umum dilaksanakan dengan menonjolkan peran gereja protestan yang berhasil memberikan wacana baru dalam pikiran anggota klen peserta didik dan merubah perilaku mereka.

G. Dipersimpangan Jalan Kebimbangan Sosial Ekonomi.

Pandangan etnosentris telah menempatkan penduduk asli Kabupaten Jayapura ke dalam tujuh belas sub suku bangsa yang tidak saja hidup dalam komunitas asli mereka, tetapi menyebar ke luar (di sekitar pusat urban kabupaten dan di luar Kabupaten Jayapura) karena daya tarik sistem sosial- ekonomi daerah urban dan pusat kegiatan baru lainnya yang didorong oleh sistem kapitalis. Para birokrat pemerintah yang hanya memegang aturan birokrasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan menganggap penduduk asli adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan dalam komunitas asli seperti kampung-kampung tradisional dan yang hidup dalam sistem sosial ekonomi pertanian dan pemetik hasil alam, akan terjebak dalam pandangan yang dibangun di atas pikiran mereka sendiri.

Ketika memberikan bantuan-bantuan proyek pembangunan dan dana yang dialirkan melalui distrik dan kampung di samping proyek-proyek dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah akan terbentur dengan para pengguna atau penerima manfaat yang bukan saja penduduk yang menghuni ruang wilayah yang dimaksud, melainkan lintas ruang wilayah melalui simpul-simpul etnis yang rumit. Kenyataan ini dapat lebih jelas lagi ketika terjadi tuntutan klaim-klaim hak atas tanah yang membingungkan orang luar dengan konsep pemikiran dan sistem sosial-ekonomi yang tidak sama dengan klen-klen tujuh belas sub suku bangsa asli kabupaten Jayapura. Hak yang diperoleh atas tanah tidak bersifat perorangan mutlak, tetapi hak untuk menggunakan atau memakai yang bersama dalam sistem sosial-ekonomi mereka sendiri. diakui

Penduduk asli memiliki latar belakang kehidupan perekonomian pemetik hasil alam, artinya mengambil langsung dari alam, sekalipun hasil cocok tanam dan ternak yang dipelihara, siap dikonsumsi atau disalurkan melalui pasar tradisional. Keinginan menghimpun modal yang sebesar-besarnya dalam

bentuk apapun tidak terdapat dalam tradisi klen-klen tujuh belas sub suku bangsa asli, yang lebih mengutamakan hak komunal klen dengan kepala klen sebagai sentral kekuasaan, termasuk pemegang hak atas penguasaan "uang" (dalam sistem moneter asli yaitu manik-manik, tomoko batu, gelang kristal, dan kulit bia kauri). Dalam konsep mereka tidak dikenal "uang" milik pribadi dan usaha pribadi untuk memperoleh dan menguasai uang secara pribadi.

Konsep ruang nyata dan ruang idea sangat erat dengan pemikiran religio magis dan sistem sosial-ekonomi tujuh belas sub suku bangsa asli di kabupaten Jayapura. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam ruang hidup di komunitas mereka, tetapi terbawa ke luar komunitas dan menjadi pandangan hidup. Suatu obyek dalam dunia idea dapat menjadi nyata ketika seseorang hanya berpikir, berperasaan dan berbicara ke dalam dunia idea. Bagi orang-orang yang terlibat ke dalamnya sangat jelas, namun tidak jelas untuk orang di luar sistem mereka.

Setiap sub suku bangsa asli di kabupaten Jayapura terbagi ke dalam klen-klen besar dan kecil, setiap klen mempunyai kepala klen (tidak ada kepala suku) dan pengurus klen yang terstruktur menurut fungsi dan sangat birokratis. Tiga peran utama yang menonjol dari kepala klen adalah: pelindung klen, pensejahtera klen dan pelestari klen.

Peran pertama dilaksanakan melalui fungsi pertahanan keamanan, kesehatan, dan sistem religi. Peran kedua dijalankan melalui sistem sosial-ekonomi cocok tanam, pengambilan bahan makanan pokok, makanan pendamping dan makanan pengganti (sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, ikan, daging/protein hewani dan lain-lain) dari lingkungan klen kemudian didistribusikan melalui rumah kepala klen yang sekaligus sebagai tempat keputusan pembagian hasil para-para dan batu matahari. Peran ketiga dijalankan melalui fungsi mengurus perkawinan (dengan upaya menjalin hubungan ke luar dan ke dalam klen) yang sesuai dengan posisi, status, dan fungsi orang dalam masyarakatnya, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam hubungan keluarga dan fungsi-fungsi dalam masyarakat/ klen.

Situasi hubungan antar klen dan sub suku bangsa melahirkan tipe kepemimpinan klen masa damai, tipe kepemimpinan klen perang, tipe kepemimpinan klen bencana alam/ penyakit dan percampuran antara ketiga tipe itu ditambah tipe berdasarkan asal usul kekuasaan dalam religi, yaitu kepala klen matahari, dan kepala klen bawah tanah. Sistem sosial - ekonomi penduduk asli ini telah berlangsung dalam perubahan-perubahan waktu sejak sebelum wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Tidore, Keresidenan Hollandia, hingga Kabupaten Jayapura yang beribukota terakhir ini di Sentani. Dengan mengadopsi bentuk pemerintahan kampung dan komunitas klen-klen yang dipimpin kepala klen dengan fungsionaris klen ditempatkan posisinya di bawah administrasi distrik dan kabupaten yang sebenarnya harus dianggap otonom.

Sistem sosial ekonomi penduduk tujuh belas sub suku bangsa asli telah dimasuki pengaruh luar yang datang bersama kelompok-kelompok lain dari sistem sosial-ekonomi kapitalis Eropa dan Timur Asing (sejak zaman Hindia Belanda dan Nederlands Nieuw Guinea) dan sistem sosial-ekonomi campuran suku bangsa sehingga terjadi pluralisme sistem sosial ekonomi dalam masyarakat yang meninggalkan kesan sampai kini. Di kabupaten Jayapura, pluralisme sistem sosial ekonomi ini membawa dampak persaingan, ketika produk dari sistem sosial - ekonomi yang satu dicoba masuk ke dalam sistem sosial-ekonomi yang lain. Misalnya barang-barang produksi sistem sosial - ekonomi penduduk asli yang ke luar melalui sistem pasar luar belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam sistem ekonomi kapitalis, sebaliknya barang-barang produksi luar diterima ke dalam sistem sosial- ekonomi asli.

Perilaku mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk memenuhi permintaan pasar dan sekedar mengejar manfaat memperoleh uang yang banyak telah mulai merusak lingkungan klen-klen yang semula hanya didekati dengan pandangan dan perilaku religio magis. Kerja sama antara anggota klen dengan pelaku-pelaku usaha luar klen menyebabkan perpecahan dalam klen-klen besar, pengaruh kepemimpinan kepala klen dan kebersamaan klen mulai ditinggalkan karena daya tarik dari ikatan-ikatan di tempat kerja baru, aliran-aliran gereja, organisasi politik, dan organisasi baru lainnya menjadi lebih kuat, ditambah lagi dengan pengaruh "uang" dan "proyek" yang berasal dari pemerintah dengan berbagai kasusnya yang telah menjadikan sistem sosial-ekonomi klen-klen tujuh belas sub suku bangsa asli di kabupaten Jayapura semakin menuju persimpangan jalan keseimbangan interaksi sosial ekonomi.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan penelitian yang berdasarkan pada teori ekonomi pertumbuhan, pemerataan, dan teori-teori lainnya, telah memposisikan anggota klen-klen lokal pada suatu tipe tertentu yang selalu tertinggal dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh teori-teori ciptaan para ahli yang memang berada dalam aliran-aliran ekonomi klasik dan modern dengan berbagai cabangnya, yang biasa dikembangkan dalam pendidikan di perguruan tinggi. Para penganut aliran-aliran ini, jebolan dari berbagai perguruan tinggi, kemudian membangun wacana ilmunya ke dalam praktek dari dalam organisasi manapun mereka bekerja, diikuti oleh orang-orang yang telah dipengaruhi dalam organisasi kerja, selanjutnya mempengaruhi pengambilan

keputusan kerja bagi perubahan masyarakat, termasuk perubahan masyarakat tujuh belas sub suku bangsa asli di Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1990). 50 Tahun misi Katolik di daerah perbatasan mulai di Arso 22- 05-1939 sampai 22-05-1989. Jayapura: tidak diterbitkan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura dan Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya (2002). Pengembangan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura, Yogyakarta: Kerjasama Bappeda Kabupaten Jayapura dan Universitas Cenderawasih Irian Jaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura dan Universitas Cenderawasih Irian Jaya (2000). Pengkajian adaptasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jayapura. Jayapura : Kerjasama Bappeda Ka-bupaten Jayapura dan Universitas Cenderawasih Irian Jaya.
- Finsterbusch, Kurt & Annabelle Bender Motz, Social research for policy decisions, Belmont: Wadsworth Publishing Company, California a division of wadsworth, inc.
- Griapon, Alexander & Yohana Mandowen. (2000). Studi tentang permasalahan dan potensi kemandirian masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, Abepura: LPPMA Irian Jaya.
- Hoogerbrugge Jac (1999). Cultuur patronen, mythe en ornament Sentani, alih bahasa oleh Jembise, Abepura: Penerbit Murrai. Kouwenhoven, W.J.H (1956) Nimboran, a study of social change and social economic development in a new guinea society, Leiden: Dissertation.
- Moeljarto. T (1993) Politik pembangunan, sebuah analisis, konsep, arah, dan strategi, cetakan kedua, Yogyakarta : Penerbit P.T. Tiara Wacana.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Etnografi Irian Jaya seri ke-4, Jayapura: Tidak diterbitkan
- Volkenkunde, Kirly Schoorl, Pim (1997) Besturen in Nederlands Nieuw Guinea 1945-1962, Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal, Land en Uitgeverij, Tweede druk.
- The Liang Gie & F. Soegeng Istanto (1968) Pertumbuhan pemerintahan Provinsi Irian Barat dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan otonominya di hari kemudian, Yogyakarta: diterbitkan oleh Seksi Penerbitan fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah mada.
- Wibawa Samudra (2001), diterbitkan oleh Seksi Penerbitan fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah mada, cetakan pertama, Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Wibawa Samudra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto (1994) Evaluasi kebijakan publik, cetakan pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Youwe, Barnabas (1991) Memori masa bhakti Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura tahun 1986-1991, Jayapura: tidak diterbitkan.